



PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* DAN STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN INFORMASI SUKARELA

Randy Yosua Immanuel
Dul Muid¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of Financial Distress Status and Corporate Governance structure on the level of voluntary disclosure. Financial Distress is proxied by company which recorded negative net income for two consecutive years. Corporate Governance structure is proxied by the board commissioner's independence, audit committee's independence, board meeting frequency, audit committee meeting frequency, and audit committee's competence. The population used in this study is the non-financial companies listed in the Indonesia Stock Exchange over the period of 2010-2013 tallying 140 samples. Sampling technique used in this study is the purposive sampling method and data analysis is done by using the multiple linear regression through the use of SPSS 16 program. Results shown in this study show that Financial Distress has a significant impact on the level of voluntary disclosure. Audit committee's independence, audit committee meeting frequency and audit committee's competence have significant positive impact on the level of voluntary disclosure. Whereas board commissioner's independence and board commissioner meeting frequency do not have significant impact on the level of voluntary disclosure.

Keywords: Financial distress, corporate governance structure, board commissioner, audit committee, voluntary disclosure

PENDAHULUAN

Kondisi keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh semua perusahaan baik yang sudah *go public* maupun yang tidak, karena kinerja suatu perusahaan dapat diketahui dari kondisi keuangan perusahaan tersebut, apakah membukukan laba atau rugi. Haryetti (2010) menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan memainkan peran yang sangat vital bagi kelangsungan hidup perusahaan di masa depan, sebab kebanyakan kasus kebangkrutan yang dialami oleh suatu usaha disebabkan oleh kondisi *financial distress* yang timbul dari pengelolaan manajemen yang buruk oleh suatu usaha. *financial distress* merupakan kondisi yang sangat dihindari oleh semua perusahaan, sebab hal ini akan menyebabkan perusahaan kesulitan dalam hal likuiditas, dan membuat perusahaan tidak mampu membayar liabilitas yang dimiliki.

Gantjowati dan Nugraheni (2014) menyatakan bahwa *financial distress* merupakan suatu objek yang sangat menarik untuk diteliti, karena kondisi tersebut dapat berpengaruh secara langsung terhadap perusahaan, pemegang saham dan masyarakat. Hal tersebut dikatakan menarik karena perusahaan yang mengalami *financial distress*, memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, sehingga perusahaan tersebut tetap mampu untuk melakukan pinjaman yang akan digunakan perusahaan agar tetap *sustain*. Andrade dan Kaplan (dalam Gantjowati dan Nugraheni, 2014) mendefinisikan *financial distress* sebagai suatu kondisi di mana perusahaan tidak mampu membayar liabilitas yang dimiliki dan merupakan suatu indikasi dimana perusahaan melakukan restrukturisasi terhadap liabilitas yang dimiliki. Dalam

¹ Corresponding author



kondisi tersebut perusahaan memiliki tingkat *cash flow* yang rendah dan dapat menyebabkan perusahaan berada dalam kondisi yang tidak likuid. Menurut Baldwin dan Scott (dalam Fathi dan Gueyie, 2001) suatu perusahaan berada dalam kondisi *financial distress* ketika bisnis perusahaan tersebut memburuk ke suatu titik di mana perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban keuangan yang dimiliki.

Di Indonesia penerapan praktek *Good Corporate Governance* adalah hal yang mutlak bagi perusahaan yang telah *go public*. Hal ini dapat dilihat pada keputusan menko bidang perekonomian nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 mengenai pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance yang merupakan komite yang menerbitkan pedoman mengenai praktek *Good Corporate Governance*. Akan tetapi, adanya pedoman mengenai praktek *Good Corporate Governance* tersebut tidak memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini tampak dalam survey *PricewaterhouseCooper* yang mengungkapkan bahwa Indonesia menempati posisi yang paling rendah dalam tingkat kepatuhan, akuntabilitas kepada pemegang saham, pengungkapan, dan standar transparansi (Irawan dan Farahmita, 2012). Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan sistem *monitoring* yang ketat bagi penerapan praktek *corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Suatu perusahaan dikatakan telah menerapkan praktek *Good Corporate Governance* dengan baik apabila perusahaan tersebut mengeluarkan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja sebenarnya dari perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki kriteria relevan dan dapat diandalkan, sebagaimana yang tertuang dalam *conceptual framework*. Dalam prakteknya, untuk memutuskan informasi apa saja yang akan diungkapkan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dicantumkan dalam prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*). Alvionita (2014) mengungkapkan bahwa laporan keuangan dapat disajikan dengan menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan prinsip pengungkapan penuh agar dapat bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan.

Pengungkapan (*disclosure*) berdasarkan sifatnya, dapat dibagi menjadi 2 yaitu, pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang berisi informasi-informasi yang material yang berpengaruh pada pengambilan keputusan pengguna yang penyusunannya adalah berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted accounting principle*). Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan atas informasi yang melebihi syarat minimum atas standar pelaporan yang berlaku yang sifatnya tidak wajib. Pengungkapan sukarela tersebut tidak memiliki standar yang berlaku umum, sehingga pengungkapannya adalah berdasarkan ketentuan yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Pengungkapan sukarela ini tidak mengikat dan dikeluarkan oleh perusahaan sebagai informasi tambahan yang relevan yang dapat membantu mempermudah proses pengambilan keputusan bagi pengguna.

Kondisi *financial distress* yang dialami oleh suatu perusahaan biasanya akan menyebabkan perusahaan tersebut enggan untuk melakukan pengungkapan sukarela (Nasir dan Abdullah, 2004). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *signaling theory* bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* akan memiliki porsi yang kecil dalam melakukan pengungkapan sukarela, dan pihak manajemen perusahaan akan menyelenggarakan akuntansi yang bersifat konservatif. Akan tetapi studi yang dilakukan oleh Wijantini, Webb dan Cohen (dalam Gantjowati dan Nugraheni, 2014) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki informasi yang buruk mengenai kinerja keuangan yang dimiliki, memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi yang lebih dalam laporan tahunan yang dimiliki untuk mengurangi beban di masa depan dan menghindari potensi terjadinya kebangkrutan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Gantjowati dan Nugraheni (2014) yang menguji pengaruh *financial distress status* dan struktur *corporate governance* terhadap luas pengungkapan informasi sukarela (*voluntary disclosure*) pada perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gantjowati dan Nugraheni (2014) yakni, penelitian ini memasukan variabel baru yaitu kompetensi komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan sebagai proksi dalam mengukur struktur *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan. Salah satu tanggung jawab dari komite audit adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan standar akuntansi yang berlaku umum (*generally accepted*

accounting principle) di laporan keuangan. Dalam memastikan tugas tersebut agar berjalan baik, tentunya diperlukan kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan yang harus dimiliki oleh anggota komite audit. Perbedaan selanjutnya dari penelitian ini terhadap penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini akan menggunakan laporan tahunan untuk periode 2010-2013, berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan laporan tahunan untuk periode 2009-2011. Pemilihan rentang waktu yang lebih panjang pada periode waktu observasi tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih valid dalam penelitian ini.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah *agency theory* dan *signalling theory*. *Agency theory* menjelaskan mengenai kontrak kerja yang dilakukan oleh pemilik perusahaan (*principle*) terhadap manager (*agent*), dimana satu orang atau lebih pemilik melakukan delegasi tugas kepada manajer (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan strategis berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. *Signalling theory* menjelaskan bahwa manajer (*agent*) akan melakukan pemberian sinyal untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi di antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap suatu perusahaan.

Hubungan *Financial Distress* terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela

Teori pemberian sinyal (*signalling theory*) menyatakan bahwa perusahaan yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) memiliki kecenderungan untuk mengurangi dan membatasi informasi yang akan disajikan kepada *public* di dalam laporan tahunan perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan tidak ingin citra perusahaan tersebut jatuh di mata investor (Gantjowati dan Nugraheni, 2014).

Berbeda dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) akan menyajikan informasi lebih kepada *public* dengan tujuan untuk mengurangi beban yang akan terjadi di masa depan dan menghindari terjadinya kebangkrutan (Gantjowati dan Nugraheni, 2014). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wijantini; Webb dan Cohen (dalam Gantjowati dan Nugraheni, 2014)

Gantjowati dan Nugraheni (2014) menyatakan bahwa ketika suatu perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*), maka manajemen perusahaan akan sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang akan di sampaikan. Kesalahan dalam memberi informasi dapat saja mempengaruhi nilai perusahaan tersebut di pasar. Berbeda jika suatu perusahaan memiliki kondisi yang sehat dalam keuangannya, manajer perusahaan tidak akan memiliki keraguan untuk langsung menyajikan informasi tersebut, karena meyakini bahwa kondisi keuangan yang sehat mampu meningkatkan nilai perusahaan di pasar dan citra perusahaan tersebut di mata investor.

Oleh karena itu, hipotesis dikembangkan sebagai berikut:

H_1 : *Perusahaan yang mengalami kondisi financial distress akan menyajikan pengungkapan informasi sukarela yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat.*

Hubungan Independensi Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela

Salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh dewan direksi. Dewan komisaris akan melakukan fungsi *controlling* apabila tugas yang dijalankan oleh direksi telah menyimpang dari apa yang seharusnya telah direncanakan. Terdapatnya dewan komisaris yang independen di dalam struktur dewan komisaris perusahaan diharapkan mampu untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Adanya anggota dewan komisaris yang independen juga diharapkan mampu untuk meningkatkan transparansi perusahaan dan mengurangi terjadinya asimetri informasi di antara pemilik perusahaan (*principle*) dan manajer (*agent*).

Samantha dan Htay et al. (dalam Gantjowati dan Nugraeni, 2014) menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi antara komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela, dan menemukan hubungan yang positif terhadap variabel tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin et al. (2009) juga menunjukkan hal yang serupa di mana

komisaris independen memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela yang disajikan oleh perusahaan. Prawinandi et al. (dalam Gantjowati dan Nugraheni, 2014) menjelaskan bahwa adanya hubungan positif antara komisaris independen terhadap pengungkapan sukarela disebabkan karena adanya pihak yang independen tersebut akan mendesak manajemen perusahaan untuk menyajikan informasi yang transparan dalam laporan tahunan perusahaan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI, 2014) No. Kep-305/BEJ/07-2004 juga menegaskan bahwa diperlukannya komisaris independen di dalam perusahaan untuk meningkatkan tersajinya pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Oleh karena itu, rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H2: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela

Hubungan Independensi Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela

Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga komite audit memiliki tanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit independen memiliki peran yang sangat penting berkaitan dengan fungsi pengawasan internal terhadap tingkat dari kualitas kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Salah satu tugas utama yang dijalankan oleh komite audit adalah memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh pihak manajemen adalah informasi yang dapat diandalkan dan bebas dari salah saji (Gantjowati dan Nugraheni, 2014).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers* (dalam Othman et al., 2014) dinyatakan bahwa komite audit yang memiliki kualitas yang tinggi adalah ketika komite tersebut memiliki anggota yang independen dan hal tersebut akan menyebabkan meningkatnya efektifitas dalam menjaga kredibilitas dalam pelaporan keuangan. Lebih lanjut person (dalam Othman et al., 2014) menyatakan bahwa keberadaan anggota komite audit yang independen mampu mengurangi terjadinya *fraud* yang dilakukan manajemen di dalam laporan keuangan. Berikut rumusan hipotesis dalam penelitian ini :

H3: Independensi komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela.

Hubungan Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela

Dalam menjalankan tugas yang dimiliki, dewan komisaris akan mengadakan rapat untuk membahas kinerja yang telah dilakukan oleh manajemen. Dalam rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, kinerja manajemen akan dievaluasi dan dewan komisaris akan memberikan *feedback* berkaitan dengan implementasi tugas yang telah dijalankan oleh manajemen. *Feedback* yang diberikan tersebut juga akan berguna sebagai bahan perbaikan untuk tugas yang akan dijalankan oleh pihak manajemen kedepannya. Gantjowati dan Nugraheni (2014) menyatakan bahwa dalam rapat yang dilakukan reguler tersebut, dewan komisaris juga akan mengevaluasi kebijakan yang telah diambil oleh manajemen dan mengatasi terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Penelitian yang dilakukan oleh Kharis dan Suhardjanto (2012; dalam Gantjowati dan Nugraheni, 2014) menyatakan bahwa semakin banyak rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris maka semakin besar pula tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4: Jumlah rapat yang diadakan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela

Hubungan Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki kepada dewan komisaris, komite audit akan mengadakan rapat reguler untuk membahas mengenai fungsi *internal control* yang dijalankan. Menurut Sutaryo et al. (dalam Gantjowati dan Nugraheni, 2014) rapat yang dilakukan oleh komite audit merupakan suatu cara yang dilakukan untuk membahas masalah yang cukup signifikan yang telah dibahas oleh manajemen perusahaan dan meninjau akurasi dari pelaporan keuangan yang disajikan manajemen.

Gantiyowati dan Nugraheni (2014) menyatakan bahwa semakin sering komite audit mengadakan rapat, maka akan semakin baik pula fungsi pengawasan yang dilakukan, berkaitan dengan pelaporan kepada auditor eksternal. Semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan, maka semakin perusahaan mampu mengurangi biaya *agency* yang terjadi melalui peningkatan transparansi dan pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Gantiyowati dan Nugraheni, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2009) dan Ettredge (2011) (dalam Gantiyowati dan Nugraheni, 2014) menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara intensitas rapat yang dilakukan komite audit terhadap pengungkapan sukarela. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H5 : Jumlah rapat yang diadakan komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela

Hubungan Kompetensi Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan Informasi Sukarela

Othman et al. (2014) menyatakan bahwa komite audit akan berkerja lebih efektif apabila proporsi anggota komite audit memiliki keahlian dalam bidang akuntansi, *auditing*, pengawasan internal dan keuangan. Efektifitas yang dihasilkan oleh komite audit adalah meningkatnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan rekomendasi atas kebijakan akuntansi yang paling sesuai dengan perusahaan, di mana hal ini tentu saja akan menyebabkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi tambahan dalam laporan tahunan sebagai penjabaran akan kebijakan baru yang dilakukan oleh perusahaan. McMullen dan Raghunathan (dalam Othman et al. 2014) menyatakan bahwa permasalahan keuangan akan jarang terjadi jika perusahaan memiliki anggota komite audit yang ahli dalam bidang keuangan, sehingga perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H6 : Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan informasi sukarela

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian Gantiyowati dan Nugraheni (2014). Pengukuran atas tingkat pengungkapan sukarela yang disajikan perusahaan adalah dengan menggunakan *voluntary disclosure checklist* yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Gantiyowati dan Ngraheni (2014). Variabel *financial distress* akan diukur dengan menggunakan variabel dummy. Di mana angka 1 akan diberikan pada perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan dan angka 0 akan diberikan pada perusahaan yang kondisi keuangannya sehat. Variabel independensi dewan komisaris di dalam penelitian ini diproksikan dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang independen dalam susunan dewan komisaris. Variabel independensi komite audit diproksikan dengan jumlah anggota komite audit yang independen. Variabel jumlah rapat dewan komisaris tersebut diukur melalui mengenai jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris. Variabel jumlah rapat komite audit diukur melalui jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit. Variabel kompetensi komite audit di bidang akuntansi dan keuangan diukur melalui jumlah anggota komite audit yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan.

Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IPSit = \beta_0 + \beta_1DISTRS + \beta_2IDKOM + \beta_3IDKAUD + \beta_4IRKOM + \beta_5IRKAUD + \beta_6KOKAUD + \beta_7SIZE + \beta_8LEV + \beta_9ROA + \beta_{10}JKAP + \varepsilon$$

Dimana:

<i>IPSit</i>	=	<i>Voluntary Disclosure Index</i> perusahaan i, pada tahun t
β_0	=	<i>Intercept</i>
β	=	Koefisien Rregresi Berganda
$\beta_1DISTRS$	=	<i>Financial Distress Status</i>
β_2IDKOM	=	Independensi Dewan Komisaris
$\beta_3IDKAUD$	=	Independensi komite Audit
β_4IRKOM	=	Jumlah Rapat Dewan Komisaris
$\beta_5IRKAUD$	=	Jumlah Rapat Komite Audit



$\beta 6KOKAUD$	=	Keahlian Anggota Komite Audit
$\beta 7SIZE$	=	Ukuran Perusahaan (<i>log of total asset</i>)
$\beta 8LEV$	=	Leverage (<i>debt to total asset</i>)
$\beta 9ROA$	=	Profitabilitas
$\beta 10JKAP$	=	Jenis Kantor Akuntan Publik
ε	=	<i>error term</i>

Variabel kontrol yang berperan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage* profitabilitas, dan jenis KAP. Pengukuran perusahaan menggunakan logarithm natural dari total aset, *leverage* dihitung berdasarkan rasio dari total liabilitas dengan total aset, profitabilitas diukur dari rasio pendapatan dengan total aset, sedangkan jenis KAP diukur dengan menggunakan variabel dummy.

Penentuan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non keuangan di Indonesia untuk periode 2011 – 2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel yang ada berdasarkan kriteria.

Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Untuk menguji hipotesis yang telah dibangun, penelitian ini mereplikasi model penelitian yang digunakan oleh Gantayowati dan Nugaheni (2014). Adapun model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IPSit = \beta 0 + \beta 1DISTRS + \beta 2IDKOM + \beta 3IDKAUD + \beta 4IRKOM + \beta 5IRKAUD + \beta 6KOKAUD + \beta 7SIZE + \beta 8LEV + \beta 9ROA + \beta 10JKAP + \varepsilon$$

Dimana:

$IPSit$	=	<i>Voluntary Disclosure Index</i> perusahaan i, pada tahun t
$\beta 0$	=	<i>Intercept</i>
β	=	Koefisien Regresi Berganda
$\beta 1DISTRS$	=	<i>Financial Distress Status</i>
$\beta 2IDKOM$	=	Independensi Dewan Komisaris
$\beta 3IDKAUD$	=	Independensi Komite Audit
$\beta 4IRKOM$	=	Jumlah Rapat Dewan Komisaris
$\beta 5IRKAUD$	=	Jumlah Rapat Komite Audit
$\beta 6KOKAUD$	=	Keahlian Anggota Komite Audit
$\beta 7SIZE$	=	Ukuran Perusahaan (<i>log of total asset</i>)
$\beta 8LEV$	=	Leverage (<i>debt to total asset</i>)
$\beta 9ROA$	=	Profitabilitas
$\beta 10JKAP$	=	Jenis Kantor Akuntan Publik
ε	=	<i>error term</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang terlihat pada tabel 1, dapat diketahui bahwa perusahaan yang ada di Indonesia pada tahun 2011-2013 yang dapat menjadi populasi penelitian adalah 550 perusahaan.

Tabel 1
Daftar Sampel Perusahaan

Keterangan	Jumlah Sampel Perusahaan
Perusahaan non keuangan yang menjadi populasi penelitian tahun 2011-2013	550
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sample	179

Tidak memiliki data yang lengkap untuk pengukuran seluruh variabel	(39)
Total observasi selama tahun 2011-2013	140

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel 1, terdapat 550 perusahaan non keuangan yang menjadi populasi dalam penelitian yang dilakukan. Perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian adalah sebanyak 179 perusahaan. Sedangkan terdapat sebanyak 39 laporan tahunan perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang diuji. Sehingga total keseluruhan sampel adalah sebanyak 140 sampel.

Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 2 menggambarkan mengenai statistik deskriptif seluruh variabel dalam penelitian ini. Nilai minimum menggambarkan nilai terkecil dari hasil pengolahan sampel. Nilai maksimum adalah nilai paling besar yang berasal dari hasil analisis data. Mean adalah nilai rata – rata yang menggambarkan jumlah data dibandingkan dengan banyaknya data masing – masing variabel. Sedangkan standar deviasi merupakan hasil pengukuran yang menjelaskan penyebaran distribusi atau variabilitas yang ada pada data. Berikut adalah hasil analisis deskriptif penelitian ini.

Tabel 2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPS	140	.28	.70	.4716	.08142
DISTR	140	.00	1.00	.5000	.50180
IDKOM	140	1.00	5.00	1.8643	.84147
IDKAUD	140	2.00	6.00	2.9571	.64453
IRKOM	140	1.00	42.00	5.5286	4.46158
IRKAUD	140	1.00	41.00	6.5786	5.43115
KOKAUD	140	1.00	4.00	2.5500	.68199
SIZE	140	21.88	32.84	28.0948	2.15924
LEV	140	.02	8.25	.6674	.80983
ROA	140	.01	3.38	.8078	.61499
JKAP	140	.00	1.00	.4643	.50051
Valid N (listwise)	140				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata pengungkapan sukarela IPS dari perusahaan sampel penelitian memiliki rata-rata sebesar 0,4716. Nilai IPS yang paling rendah adalah sebesar 0,28, di mana nilai tersebut berasal dari pengungkapan PT Triwira Insanlestari, Tbk. Sedangkan nilai IPS yang paling besar adalah 0,70 yang berasal dari pengungkapan PT Astra International, Tbk.

Jumlah rata-rata anggota dewan komisaris independen (IDKOM) dalam empat tahun dari perusahaan sampel adalah sebesar 1,864. Rata-rata independensi komite audit (IDKAUD) dalam empat tahun perusahaan sampel adalah sebesar 2,957. Rata-rata jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris (IRKOM) dalam empat tahun dari perusahaan sampel rata-rata diperoleh sejumlah 5,528 kali. Jumlah rapat yang paling sedikit yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah sejumlah 1 kali dan yang terbanyak adalah sejumlah 42 kali. Rata-rata jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit (IRKAUD) dalam empat tahun dari perusahaan sampel rata-rata dari seluruh sampel penelitian adalah sejumlah 6,578 kali. Jumlah rapat yang paling sedikit dilakukan oleh komite audit adalah sejumlah 1 kali, sedangkan jumlah rapat yang paling banyak dilakukan adalah sejumlah 41 kali dalam setahun. Jumlah rata-rata anggota komite audit yang memiliki kompetensi

dalam bidang akuntansi dan keuangan (KOKAUD) dalam empat tahun dari perusahaan sampel penelitian adalah sebesar 2,550. Jumlah anggota komite audit yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan yang paling rendah adalah sebanyak 1 orang sedangkan yang paling tinggi adalah sebanyak 4 orang..

Ukuran Perusahaan (SIZE) merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini. Rata-rata ukuran perusahaan sampel penelitian adalah sebesar 28,09. Ukuran perusahaan sampel penelitian yang terkecil adalah sebesar 21,88, sedangkan ukuran perusahaan sampel penelitian yang terbesar adalah 32,84. Rata-rata *leverage* (LEV) seluruh perusahaan sampel penelitian selama empat tahun adalah sebesar 0,667. Untuk *leverage* perusahaan sampel penelitian yang terendah adalah sebesar 0,02, sedangkan *leverage* perusahaan sampel penelitian yang tertinggi adalah 8,25. Rata-rata profitabilitas (ROA) seluruh perusahaan sampel penelitian selama empat tahun adalah sebesar 0,80. Untuk profitabilitas perusahaan sampel penelitian yang terendah adalah sebesar 0,01, sedangkan profitabilitas perusahaan sampel penelitian yang tertinggi adalah 3,38. Rata-rata jenis kantor akuntan publik (JKAP) dari seluruh perusahaan sampel penelitian selama empat tahun adalah 0,464.

Pembahasan Hasil Regresi

Hasil uji statistik t disajikan pada tabel 3. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen (Ghozali, Imam 2011). Pada tabel 3 menjelaskan hasil uji statistik t model penelitian untuk menguji seluruh hipotesis penelitian.

Tabel 3

Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.196	.053		3.709	.000
	DISTR	-.057	.008	-.354	-7.201	.000
	IDKOM	.007	.005	.077	1.641	.103
	IDKAUD	.014	.007	.115	2.031	.044
	IRKOM	.000	.001	-.014	-.328	.744
	IRKAUD	.001	.001	.095	2.096	.038
	KOKAUD	.051	.006	.427	8.066	.000
	SIZE	.004	.002	.104	1.989	.049
	LEV	-.008	.004	-.076	-1.738	.085
	ROA	-.012	.006	-.091	-1.982	.050
	JKAP	.030	.007	.182	4.012	.000

a. Dependent Variable: IPS

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2015

Tabel 3 menyajikan hasil regresi untuk menguji hipotesis pertama dan model kedua yang digunakan untuk menguji hipotesis. Pengujian mengenai pengaruh variabel *financial distress* terhadap luas pengungkapan sukarela yang didasarkan pada nilai t diperoleh sebesar -7,201 dengan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai probabilitas yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel *financial distress status* (DISTR) terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Nilai beta sebesar -0,354 menandakan arah koefisien yang negatif dengan hipotesis. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil oleh data adalah **hipotesis 1 (H1) diterima**, di mana perusahaan yang mengalami *financial distress* akan menyajikan informasi sukarela yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang

sehat di dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori signalling yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* memiliki kecenderungan untuk membatasi informasi yang akan disajikan kepada publik, karena hal ini akan berpengaruh kepada nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja buruk dalam laporan keuangan tentu saja akan menurunkan nilai perusahaan di mata para *shareholder*. Berbeda dengan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik, perusahaan tersebut akan menyajikan informasi yang lebih banyak kepada publik sebagai sinyal bahwa implementasi dari strategi perusahaan berhasil dan hal ini tentunya akan menaikkan nilai dari perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Abdullah (2004) dan Gantjowati dan Nugraheni (2014).

Pengujian mengenai pengaruh variabel independensi dewan komisaris terhadap luas pengungkapan sukarela yang didasarkan pada nilai t diperoleh sebesar 1,641 dengan probabilitas sebesar $0,103 > 0,05$. Nilai probabilitas yang berada di atas 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan dari variabel independensi dewan komisaris (IDKOM) terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Nilai beta sebesar 0,077 menandakan arah koefisien yang positif dengan hipotesis. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil data adalah **hipotesis 2 (H2) ditolak**, di mana independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela. Ada beberapa faktor yang menyebabkan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela, salah satunya adalah dewan komisaris hanya bekerja separuh waktu saja, artinya anggota dewan komisaris independen tersebut tidak hanya menjadi dewan komisaris independen hanya untuk satu perusahaan saja, melainkan bisa lebih dari satu perusahaan. Hal ini menyebabkan anggota dewan komisaris independen untuk sulit memahami kompleksitas dari operasi bisnis perusahaan sehingga memiliki pengaruh yang kurang besar dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Faktor penyebab selanjutnya adalah jumlah anggota dewan komisaris yang independen dibatasi jumlahnya oleh perusahaan dan hanya digunakan sebagai formalitas saja dalam memenuhi ketentuan dari BEI yang tercantum dalam peraturan No. Kep-305/BEJ/07-2004 untuk memiliki proporsi dewan komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001)

Pengujian mengenai pengaruh variabel independensi komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela yang didasarkan pada nilai t diperoleh sebesar 2,031 dengan probabilitas sebesar $0,044 < 0,05$. Nilai probabilitas yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel independensi komite audit (IDKAUD) terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Nilai beta sebesar 0,115 menandakan arah koefisien yang positif dengan hipotesis. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil data adalah **hipotesis 3 (H3) diterima**, di mana independensi komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela. Hal ini disebabkan karena fokus dan perhatian utama komite audit adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah mengikuti standar yang berlaku. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) dan Gantjowati dan Nugraheni (2014).

Pengujian mengenai pengaruh variabel jumlah rapat dewan komisaris terhadap luas pengungkapan sukarela yang didasarkan pada nilai t diperoleh sebesar -0,328 dengan probabilitas sebesar $0,744 > 0,05$. Nilai probabilitas yang berada di atas 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang tidak signifikan dari variabel jumlah rapat dewan komisaris (IRKOM) terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Nilai beta sebesar menandakan arah koefisien yang negatif -0,014 dengan hipotesis. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil data adalah **hipotesis 4 (H4) ditolak**, di mana jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela. Rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris setiap tahunnya cukup terbatas, padahal perusahaan memiliki tingkat kompleksitas yang beragam atas kegiatan operasional yang dimiliki. Hal ini menyebabkan bahwa rapat yang diadakan oleh dewan komisaris tidak akan memiliki dampak yang cukup besar bagi peningkatan kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gantjowati dan Nugraheni (2014).

Pengujian mengenai pengaruh variabel jumlah rapat komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela yang didasarkan pada nilai t diperoleh sebesar 2,098 dengan probabilitas sebesar $0,038 < 0,05$. Nilai probabilitas yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel jumlah rapat komite audit (IRKAUD) terhadap luas pengungkapan

sukarela (*voluntary disclosure*). Nilai beta sebesar 0,095 menandakan arah koefisien yang positif dengan hipotesis. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil oleh data adalah **hipotesis (H5) 5 diterima**, di mana jumlah rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela. Rapat reguler yang diadakan oleh komite audit memiliki fungsi pengawasan dalam proses pengungkapan informasi yang disajikan oleh perusahaan. Sutaryo et al. (2011; dalam Gantayowati dan Nugraheni, 2014) menyatakan bahwa rapat komite audit merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam mengurangi biaya agensi antara pemilik dan agen melalui peningkatan transparansi dalam pengungkapan informasi sukarela kepada para pengguna laporan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uzliawari et al. (2014) dan Persons (2009).

Pengujian mengenai pengaruh variabel jumlah rapat dewan komisaris terhadap luas pengungkapan sukarela yang didasarkan pada nilai t diperoleh sebesar 8,066 dengan probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai probabilitas yang berada di bawah 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kompetensi komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Nilai beta sebesar 0,427 menandakan arah koefisien yang positif dengan hipotesis. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil oleh data adalah **hipotesis 6 (H6) diterima**, di mana kompetensi komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela. Kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan diperlukan agar komite audit dapat secara efektif menjalankan tugas yang dimiliki. Chapple et al. (2012; dalam Uzliawati et al., 2014) menyatakan bahwa efektivitas yang dimiliki oleh komite audit tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, di mana hal tersebut akan meningkatkan jumlah informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan tahunan.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress* dan struktur *corporate governance* yang terdiri dari independensi dewan komisaris, independensi komite audit, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit dan kompetensi komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela. Total sampel laporan tahunan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 140. Penelitian ini telah menguji hipotesis dari enam variabel independen yaitu *financial distress* (DISTR), independensi dewan komisaris (IDKOM), independensi komite audit (IDKAUD), jumlah rapat dewan komisaris (IRKOM), jumlah rapat komite audit (IRKAUD), dan kompetensi komite audit (KOKAUD) terhadap luas pengungkapan informasi sukarela. Berdasarkan hasil olah data dan analisis data, terdapat empat variabel independen yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan informasi sukarela, di antaranya adalah *financial distress* independensi komite audit, jumlah rapat komite audit dan kompetensi komite audit.

Penelitian ini menghadapi beberapa batasan. Keterbatasan ini diharapkan mampu diperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 1. Penggunaan sampel data penelitian ini masih terbatas pada perusahaan non keuangan . 2. Penelitian ini masih mengandung unsur subjektivitas dari peneliti dalam pengukuran variabel IPS.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diajukan saran – saran terhadap hasil penelitian, yaitu penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sampel yang digunakan karena penelitian ini hanya meneliti perusahaan non keuangan dengan jumlah sampel yang tidak terlalu banyak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah tahun pengamatan sehingga memperoleh jumlah sampel yang lebih banyak sehingga mampu menghasilkan hasil uji yang lebih baik. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen baru seperti, kompetensi dewan komisaris dan/atau kepemilikan saham oleh dewan komisaris

**REFERENSI**

- Akbar, Nikmatullah Firdaus. 2014. "Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan." Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Akhtaruddin, M., Hossain, M. A., Hossain, M., & Yao, L. 2009. "Corporate governance and voluntary disclosure in corporate annual reports of Malaysian listed firms." *Journal of Applied Management Accounting Research*, 7(1), 1-19.
- Alvionita, Janet. 2014. "Pengaruh Voluntary Disclosure dan Reaksi Pasar Modal Terhadap Audit Verification." Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia [FGCI]. 2008. "Peranan Dewan Komisaris dan komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance." Jakarta: Pengarang
- Gantjowati, Evi. & Nugraheni, Rosa Lenna. 2014. "The Impact of Financial Distress Status and Corporate Governance Structures on the Level of Voluntary Disclosure Within Annual Reports of Firms." *Journal of Modern Accounting and Auditing*, Vol. 10, No. 4, 389-403.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haryetti. 2010. "Analisis Financial Distress untuk Memprediksi Risiko Kebangkrutan Perusahaan." *Jurnal Ekonomi*, Vol. 18, No. 12.
- Ho, Simon S.M., & Wong, Kar Shun. 2001. "A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure." *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 139-156.
- Komite Nasional Kebijakan Governance [KNKKG]. 2006. "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia." Jakarta: Pengarang.
- Mutmainah, Nurul. 2012. "Analisis Pengaruh Kualitas Komite Audit Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi." Skripsi: Universitas Indonesia.
- Nasir, N. M., & Abdullah, S. N. (2004)." Voluntary disclosure and corporate governance among financially distressed listed firms in Malaysia." *Financial Reporting, Regulation, and Governance*
- Nuswandari, Cahyani. 2009. "Pengungkapan Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Signalling Theory." *Kajian Akuntansi*, Vol. 1, No.1, h. 48-57.
- Persons, Obeua.2009. "Audit Committee Characteristics and Earlier Voluntary Ethics Disclosure Among Fraud and No-frauds Firms."
- Uzliawati, Lia., Suhardjanto, Djoko., & Djati, Kartika. 2014. "The Characteristics of Audit Committee and Intellectual Capital Disclosure in Indonesia Banking Industry." *International Journal of Business Review*. Vol. 3, No. 2.
- Wardhani, Rani. 2007. "Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan-perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 1, h. 95-114.